

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah (reformasi pemerintah daerah di Indonesia). Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah. kedua memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah, (Mardiasmo, 2004).

Dalam perkembangannya, era reformasi dan otonomi daerah telah ikut mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Pemerintah daerah sekarang mendapat amanat untuk mengelola dana publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam berbagai bidang atau urusan. Amanat tersebut tercantum dalam Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 pasal 3, Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ulum (2008) mengatakan otonomi daerah identik dengan tuntutan akuntabilitas, *good governance*, dan sebagainya. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat secara jujur. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan, (Amin, 2011: 1).

Salah satu indikator untuk mengetahui kejujuran dan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya (Ulum, 2008). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, (Sihombing, 2011: 4).

Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya

akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri, (Mahmudi, 2010: 9).

Akibat lain dari informasi yang salah dan menyesatkan tersebut adalah para pengguna laporan yang kritis dan rasional akan bereaksi misalnya dengan memberikan kritik atau bahkan menuntut pemerintah selaku penyaji laporan karena telah memberikan informasi yang salah dan menyesatkan sehingga pengguna laporan tersebut dirugikan secara material akibat terlalu percaya dengan laporan tersebut. Jika pemerintah mengabaikan reaksi dari pengguna laporan tersebut atau cenderung membela diri, maka pemerintah akan terus membuat laporan keuangan yang buruk kualitasnya. Untuk menghindari hal tersebut satu-satunya cara adalah pemerintah harus terbuka untuk menerima kritik dan masukan serta berusaha untuk terus memperbaiki kualitas laporan keuangan yang di publikasinya.

Mardiasmo (2004: 34) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Sedangkan Mahmudi (2010: 19) kualitas

laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkannya. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah.

Untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan dihasilkan, maka kita perlu mengetahui siklus akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Pada prinsipnya sistem akuntansi pemerintah daerah bisa berupa sistem akuntansi maupun berkomputerisasi. Jika pemerintah daerah sudah menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh computer. dengan demikian, apabila pemerintah tersebut menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi laporan keuangan yang dihasilkannya pun akan lebih tepat waktu, lebih bervariasi, dan akan lebih berkualitas, (Mahmudi, 2010: 27).

Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan. Bastian (2007: 4) mengungkapkan bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka

belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan yang dihasilkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Namun mengingat sumber daya manusia yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik maka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji. Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Fajar, 2011: 3). Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang diperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Mardiasmo (2004) bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.

Terkait dengan hal tersebut pada laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo tiga tahun berturut-turut (2009-2011) berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kualitas laporan keuangan Pemerintah Gorontalo masih memberikan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan Kota

Gorontalo dari tahun 2009 hingga tahun 2011, BPK berpendapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, namun terdapat keadaan tertentu yang berkaitan dengan yang dikecualikan, hal-hal tersebut di antaranya masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, kecurangan, dan ketidakpatuhan yang material oleh BPK, juga masih ditemukannya kasus dalam sistem pengendalian intern terkait dengan sistem akuntansi dan pelaporan, sistem anggaran dan belanja dan juga sistem pengendalian intern, (IHPS BPK, 2011). Untuk lebih jelasnya tabel berikut menyajikan temuan-temuan untuk pemerintah kota Gorontalo sebagaimana terdapat dalam IHPS BPK (2011) berikut:

**Tabel 1: Temuan BPK ATAS LKPD
Pemerintah daerah Kota Gorontalo**

No	Temuan BPK Untuk Kota Gorontalo	Jumlah Kasus
1	Sistem Akuntansi dan pelaporan	5 kasus
2	Sistem pelaksanaan anggaran dan belanja	8 kasus
3	Kerugian daerah dan potensi kerugian daerah	5 kasus
4	Kekurangan penerimaan	5 kasus
5	Adminitrasi	9 kasus
7	Ketidakhematan	2 kasus
8	Ketidakefektifan	1 kasus

Sumber: Ihtisar hasil pemeriksaan BPK

Berbagai penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti terkait dengan pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan diantaranya pernah dilakukan oleh Fajar (2011) dimana penelitiannya dilakukan pada pemerintah Kota Bandung dengan judul pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung hasil penelitiannya tersebut membuktikan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan

keuangannya. Penelitian Sihombing (2011) yang penelitiannya dilakukan pada pemerintahan Kabupaten Kota Wilayah Priangan Jawa Barat dengan judul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hasil penelitiannya bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dibahas pada latar belakang maka identifikasi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksanaa BPK atas Kualitas laporan keuangan Kota Gorontalo, dalam tiga tahun terakhir (2009-2011) masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian hal tersebut dikarenakan masih adanya kasus-kasus yang ditemukan oleh BPK terkait dengan kualitas laporan keuangan BPK.
2. Masih ditemukannya kasus dalam sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo terkait dengan sistem akuntansi dan pelaporan, sistem anggaran dan belanja dan juga sistem pengendalian intern.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis dan teoritis.

1. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kota Gorontalo untuk dijadikan referensi serta masukan bagi pemerintah daerah Kota Gorontalo guna meningkatkan kinerja terutama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empirik dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan.